I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan multi budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang terbentang luas dari Sabang sampai ke Merauke, memiliki sumber daya alam (*natural resources)* yang melimpah seperti untaian zamrud di khatulistiwa dan juga sumber daya budaya (*cultural resources)* yang beraneka ragam bentuknya (Koentjaraningrat, 1980).

Kemajemukan di indonesia merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya, namun semua itu menjadi berbeda ketika kemajemukan tidak dihadapi secara dewasa dan penuh dengan pemaknaan positif dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Semua kekayaan menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan suatu negara yang sedang dalam fase berkembang.

Dari satu sisi, secara teori multi budaya tersebut merupakan potensi budaya yang dapat mencerminkan jati diri bangsa. Secara historis, multi budaya tersebut telah dapat menjadi salah satu unsur yang menentukan dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, multi budaya juga menjadi modal budaya (*cultural capital)* dan kekuatan budaya (*cultural power)* yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi, dari sisi lain, multi budaya juga berpotensi untuk menimbulkan konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa. Karena konflik antar budaya dapat menimbulkan pertikaian antar etnis, antar penganut agama, ras maupun antar golongan yang bersifat sangat sensitif dan rapuh terhadap suatu keadaan yang menjurus ke arah dis-integrasi bangsa. Fenomena ini dapat terjadi, apabila konflik tersebut tidak dikendalikan dan diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh pemerintah bersama seluruh komponen anak bangsa.

Kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong-royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah dan mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik.

Semua etnis pada akhirnya menuju pada usaha untuk menciptakan kebaikan manusia, baik di keluarga maupun masyarakat luas. Jika hal itu dianggap sebagai misi (*mission*) etnis, maka etnis manapun juga tidak akan menimbulkan persoalan bila etniknya mengajarkan moral secara pribadi, maka tidak akan terjadi konflik. Tetapi sayangnya etnis saat ini tidak sesederhana itu, karena menjalankan misi etnis ini, diperlukan suatu aparat, suatu kendaraan, suatu organisasi. Dengan demikian organisasi primordial menjadi sebuah kebutuhan.

Secara umum, kehidupan dan pergaulan antar etnis tampil harmonis akan tetapi hal ini bukan berarti tidak pernah terjadi ketegangan, dan dewasa ini beberapa daerah di Indonesia sangat sering terjadi konflik baik itu antar suku atau agama,

yang disebabkan perbedaan-perbedaan kecil, dan perbedaan kecil tersebut menjadi masalah yang akhirnya sulit untuk dikendalikan.

Sangat wajar ketika ketegangan dan persinggungan terjadi dalam suatu masyarakat yang beragam, sebab bagaimanapun juga dalam masyarakat majemuk mesti terdapat persaingan dan justru dalam persaingan tersebut terdapat dinamika yang membentuk kedewasaan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Kemajemukan pada masyarakat multi etnis merupakan kunci dalam kemajuan daerah tersebut, itu dikarenakan perbedaan etnis justru membangun nilai gotong royong dalam masyarakat guna terbinanya nilai kekeluargaan dimasyarakat yang penuh perbedaan. Dalam beberapa hal memang agama dan etnis sangat berbeda yang satu dengan yang lain, namun perbedaan tersebut bukanlah jurang yang membentuk skat pembatas nilai keharmonisan.

Dalam beberapa etnis atau budaya, ada yang mencampur-baurkan nilai agama dengan nilai budaya, sebagai contoh sederhana, masyarakat etnis Jawa Abangan yang masih kental akan nilai agama yang menyatu dengan kepercayaan dalam budaya mereka. Selain itu juga, etnis Bali yang masih menyatukan nilai agama dengan budaya dan hampir tidak ada batasan. Seharusnya semua itu membuat keberagaman etnis bisa dikendalikan dalam kerangka doktrin agama yang menyatu dengan budaya dan menjadi pembatas tindakan anarkis suatu etnis.

Perbedaan etnis merupakan kekayaan masyarakat indonesia, karenanyalah kita bisa mengenal perbedaan dan membuka pikiran kita dalam perspektif yang lebih luas tanpa harus kita pergi dari lingkungan tempat tinggal kita. Selain itu juga

masyarakat yang multi etnis akan membuat etnis mereka secara internal lebih baik dan berkembang tanpa terkungkung oleh zaman yang terus berkembang.

Dari perspektif antropologi, konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terlebih lagi dalam masyarakat yang berbentuk multi budaya. Selain itu, konflik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah bagaimana konflik itu dikendalikan dan diselesaikan secara damai dan bijaksana, agar tidak menimbulkan dis-integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Setiap agama memiliki konsep kerukunan dan setiap agama juga mengajarkan pada umatnya untuk saling menjaga satu sama lainnya. Dalam Al-kitab disebutkan "Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun" (Mazmur 133: 1). Dalam pasal lainpun disebutkan, ialah "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" (Markus 123: 31).

Dari pernyataan Al-kitab tampak jelas bahwa agama Kristen mengajarkan hidup rukun, saling menjaga dan saling mengasihi antar umat manusia. Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk saling mengenal. Seperti dalam Al Qur'an Surat Al Hujurat (ayat 13) yang artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal". Dalam hubungan ketetanggan, perbedaan agama tidak menjadi kendala untuk tetap hidup rukun berdampingan.

Mereka berbeda agama tetapi dalam ketetanggaan tetap bersatu, tolong menolong, dan bantu-membantu terutama antar tetangga dekat. Apabila tetangga berbeda agama mempunyai hajat membantu pelaksanaannya, tetangga sakit menjenguknya, tetangga dapat musibah umpamanya ada anggota keluarganya meninggal, tetangga dekat datang dan membantu menyiapkan tempat dan membantu dalam proses penguburannya. Dengan kata lain perbedaan agama dalam ketetanggaan tidak menimbulkan suasana yang tidak rukun, melainkan sebaliknya sekalipun berbeda agama hubungan ketetanggaan mereka tetap rukun.

Keharmonisan hubungan antar etnis tidak akan mungkin terlahir dari sikap fanatisme dan sikap tak peduli atas hak dan perasaan orang lain. Sebab, hal ini akan menimbulkan kekacauan dan akan merusak nilai budaya itu sendiri. Keharmonisan hubungan antar etnis hanya akan bisa dicapai apabila masing-masing golongan etnis bersikap lapang dada satu sama lain. Maka bukan semangat untuk menang sendiri yang perlu dikembangkan, melainkan sikap menerima dalam perbedaan.

Menurut Amirulloh Syarbini dkk (2011: 60), manusia adalah makhluk yang paling mulia di dunia. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya manusia memiliki kelebihan dengan akal dan pikirannya. Manusia dapat membedakan yang hak dengan yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Namun demikian, kelebihan yang dimiliki manusia terkadang menjadikan manusia cenderung ekploitatif terhadap yang lainnya. Bahkan dengan sistematik melakukan perusakan alam yang semestinya dijaga dan dimanfaatkan.

Menurut Ioanes Rakhmat (2011) sebagai pemerhati perkembangan *sains* yang aktif dalam kegiatan pengkajian hubungan antar umat beragama, dari antara umat-umat beragama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia, Muslim dan Kristen adalah dua kalangan yang paling kental dan paling terang-terangan mendesakkan keyakinan-keyakinan keagamaan mereka kepada masyarakat. Sudah banyak pemerintah berbagai provinsi/kabupaten di Indonesia memberlakukan syariah Islam sebagai landasan pemerintahan. Akibatnya, hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengikat bangsa dan negara diabaikan atau disingkirkan, sementara pemerintah pusat di Jakarta mendiamkan saja.

Perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sentuhan dan pengaruh agama-agama yang ada dan berkembang di Indonesia. Dengan datangnya agama Hindu disusul Budha juga Islam yang kemudian Kristen baik itu Protestan maupun Katolik, dan juga bersamaan datangnya bangsa China yang kebanyakan beragama Konghucu, maka agama tersebut ikut memperkaya dunia keagamaan di Indonesia. Kenyataan hidup dan berkembangnya berbagai agama tersebut menambah corak kemajemukan bangsa Indonesia, dan kemajemukan tersebut menjadi sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari.

Oleh karenanya, hidup di dalam kemajemukan merupakan proses dari kemajemukan, baik aktif maupun pasif menjadi kepercayaan yang menyusup ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia, tak terkecuali juga dalam hal kepercayaan (agama). Menurut Amirulloh Syarbini dkk (2011: 54), ketika agama telah memasuki ranah ideologi, maka ketika itu agama telah menjadi bagian dari

kebenaran yang harus dipertahankan dan diperjuangkan dengan berbagai cara, termasuk cara yang hakikatnya "melawan" teks agama itu sendiri.

Menurut Haidlor Ali Ahmad (2010: 185), bangsa Indonesia hidup dalam masyarakat majemuk, masyarakat serba ganda, ganda kepercayaannya, kebudayaannya, dan agamanya. Kemajemukan itu dapat menimbulkan dis-integrasi sosial yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan. Sementara hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mewujudkan stabilitas yang sehat dan dinamis guna terlaksananya pembangunan nasional. Pasca amandemen UUD 1945, jaminan kebebasan beragama atau berkepercayaan semakin kuat dengan dirumuskannya pasal 28E.

Salah satu perkembangan yang penting dewasa ini adalah bahwa masing-masing etnis mempunyai semacam puncak organisasi, setidak-tidaknya berdiri di atas kelompoknya. Dalam masyarakat Indonesia, dapat ditemukan keanekaragaman lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga yang dibangun negara, yang bertujuan untuk membangun suatu kehidupan yang rukun antar etnis dan antar umat beragama di Indonesia, yang bertahan langgeng dan untuk jangka panjang ke depan. Dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjembatani kerukunan antar umat beragama dan menjadi lembaga yang membantu pemerintah dalam hal pembangunan yang bersifat peribadatan (Ikhlas Beramal, 2010).

Menurut Jaumin Ma'Arif (2004), kasus konflik antar aliran ini umumnya dililit oleh bias kepentingan. Lebih jauh ia mengatakan, masalah yang dipersoalkan melebar dan lebih condong kepada kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa

konflik antar etnis dan antar agama di Indonesia umumnya hanya bermula dari masalah yang sangat sederhana, yaitu fanatisme yang seharusnya hanya berlaku internal itu memasuki wilayah relasi sosial.

Jadi jelaslah yang bersaing bukan misi etnis itu sendiri, melainkan organisasinya. Organisasi itu bersifat badan atau fisik, sedangkan misi itu bersifat rohaniah, banyak pertentangan antara etnis didasarkan pada aspek organisasi itu, yakni usaha mencari pengikut yang pada akhirnya selalu berhubungan dengan usaha mencari dana. Maka, terjadilah konflik antar etnis yang berbeda. Menurut Burhanudin dkk (1998), dalam hubungan antar dan intra etnis, pertentangan terjadi bila sumber daya manusia atau pengikut etnis tertentu merasa akan diambil oleh kelompok yang lain.

Kabupaten Lampung Selatan dapat dijadikan cermin kehidupan bagi daerah-daerah memiliki konflik agama atau etnis yang berkepanjangan tanpa ada titik temu perdamaian, seperti banyak terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia, dan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan membentuk forum-forum dialog yang sifatnya terbuka untuk warga masyarakat. Seperti pertemuan yang dihadiri oleh kepala-kepala dusun dan sesepuh untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar melalui forum kerukunan umat beragama.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 (tujuh belas) kecamatan dan sedikitnya 251 (dua ratus lima puluh satu) desa di dalamnya juga 31 (tiga puluh satu) pulau mengelilinginya, diseluruh kecamatan mempunyai keanekaragaman agama dan etnis yang berkembang pasca kolonisasi pertama pada tahun 1905 ketika

pemerintahan kolonial belanda baik itu secara kelompok, spontan ataupun sisipan dan transmigrasi pertama pada tahun 1948 setelah negara merdeka dari penjajahan jepang (BPS Lam-sel 2011).

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang sering terjadi konflik antar golongan, dan kondisi konflik tersebut dibiarkan terpelihara oleh pemerintah dengan tidak menyelesaikan akar permasalahan secara serius. Dari serangkaian konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, penyelesaian hanya dilakukan secara sepihak, yaitu pemerintah dengan etnis yang bertikai, bukan antara kedua etnis kelompok yang didamaikan secara musyawarah dan mufakat.

Way Panji adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Lampung Selatan, dan merupakan salah satu kecamatan yang di dalamnya terdapat berbagai corak kehidupan, baik itu agama atau etnis dan budaya. Ada beberapa desa yang di dalamnya terdapat berbagai agama seperti Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Hindu dan berbagai etnis mengisi corak pergaulan di daerah itu. Penduduk dengan etnis Bali di Kecamatan Way Panji adalah salah satu masyarakat transmigran tertua di Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan.

Kecamatan Kalianda merupakan daerah yang ketika kekuasaan dikendalikan oleh kolonial Belanda adalah wilayah yang dipergunakan untuk kolonisasi pertama dengan metode sisipan, yaitu pendatang di campur oleh masyarakat pribumi di daerah tersebut. Metode ini sangat efektif, dimana masyarakat pendatang dengan cepat membaur dengan masyarakat pribumi tanpa terpatok oleh budaya yang

sudah melekat sebagai identitas mereka, yang pada akhirnya memperkaya khasanah budaya di Kalianda itu sendiri.

Kecamatan Kalianda merupakan kecamatan yang paling tenang di Lampung Selatan, tetapi Kecamatan Kalianda dikelilingi oleh kecamatan-kecamatan yang sering terjadi konflik di Lampung Selatan. Dengan kondisi demikian, kecamatan Kalianda secara otomatis memiliki potensi konflik, dan akhirnya menghambat mobilitas dan perekonomian di pusat kota Kabupaten Lampung Selatan tersebut. Itu terbukti ketika terjadi ketegangan di Kecamatan Sidomulyo, praktis kegiatan perdagangan di Pasar Inpres Kecamatan Kalianda terganggu dan sepi dengan pengunjung maupun penjual.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas perilaku etnis Bali di Kabupaten Lampung Selatan dengan etnis non-Bali di Kabupaten Lampung Selatan?
2. Mengapa konflik etnis Bali dengan etnis Lampung cepat membesar di Kabupaten Lampung Selatan?
3. Bagaimana peran pemerintah terkait resolusi konflik di Kabupaten Lampung Selatan?
4. Bagaimana realitas keharmonisan antara etnis Bali dengan etnis Lampung di Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui realitas perilaku etnis Bali dengan etnis non-Bali di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Ingin mengetahui mengapa konflik etnis Bali dengan etnis Lampung cepat membesar di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Ingin mengetahui peran pemerintah terkait resolusi konflik di Kabupaten Lampung Selatan.
4. Ingin mengetahui realitas keharmonisan antara etnis Bali dengan etnis Lampung di Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi empiris dan pengetahuan seputar keharmonisan dan kerukunan hidup dalam masyarakat yang majemuk, yang pada dewasa ini menjadi perhatian serius. Secara akademis penelitian ini nantinya bisa dijadikan referensi bagi proses penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/referensi tambahan, bagi masyarakat mampu secara tepat memposisikan realitas keanekaragaman suku, agama, dan budaya di kecamatan Way Panji dan dapat diketahui dampak positif jika masyarakat majemuk lebih menjunjung tinggi perbedaan.